

Dana Parpol Untuk Pendidikan Politik

Kubu Raya, BERKAT.

Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotein menegaskan setiap partai politik yang mendapat dana bantuan hendaknya digunakan untuk pendidikan politik kepada masyarakat.

"Kita tahu saat ini setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik. Mereka ini lah menjadi kader-kader parpol yang militan. Sudah menjadi kewajiban parpol untuk memberikan pendidikan politik kepada kadernya yang dananya dapat digunakan dari bantuan pemerintah," kata Wakil Bupati Andreas disela membuka sosialisasi UU Parpol Nomor 2 tahun 2011 perubahan atas UU Parpol Nomor 2 tahun 2008 belum lama ini.

Disebutkan Wakil Bupati Andreas, dalam rangka membentuk militansi kaderisasi tidak lepas melihat dari kondisi Kubu Raya dengan warganya yang beragam multientis dan multiagama.

"Peran parpol untuk memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada kadernya yang multi tersebut," tuturnya.

Dan ia mengharapakan dana bantuan



WAKIL BUPATI KUBU RAYA, ANDREAS MUHROTEIN KETIKA MEMBUKA SOSIALISASI UU PARPOL NO. 2/ 2011.

FOTO:IST.

untuk pendidikan politik tersebut hendaknya dikelola dengan baik dan

bijaksana, sehingga parpol dapat memberikan pertanggung jawabannya nanti ketika diperiksa. Kurangnya pengetahuan pengelolaan keuangan kerap terjadi pada setiap parpol.

"Karena itu dengan adanya BPK, maka parpol dapat mengerti dan mengetahui cara mengelola keuangannya sehingga tidak terjerumus pada kesalahan yang fatal soal keuangan," ucap Wakil Bupati Andreas.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesbangpolinmas (Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kubu Raya, Suwanri menyebutkan pihaknya sengaja mendatangkan BPK RI sebagai narasumber pada sosialisasi UU Parpol Nomor 2 tahun 2011 tersebut untuk memberikan tata cara pertanggungjawaban keuangan.

Dia sebutkan, menjelang pemilu 2014, undang-undang maupun ketentuan-ketentuan dari Menteri Dalam Negeri telah menjelaskan bahwa batas verifikasi baik partai baru dan yang sudah berbadan hukum harus diverifikasi ulang ke Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 22 Agustus 2011 ini

"Hal ini berkaitan juga dengan bantuan yang diperoleh sebuah parpol. Untuk besarnya memang belum ada kenaikan dibandingkan tahun lalu. Karena itu terlaksananya audit laporan keuangan dengan baik maka akan mewujudkan pemilu yang aman, tertib, damai dan lancar khususnya di Kubu Raya," pungkasnya.(rob)